

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Yaman adalah satu-satunya negara yang menganut sistem pemerintahan republik di Jazirah Arab. Dengan kepala negaranya dipimpin oleh seorang Presiden yang dipilih melalui pemilihan umum dengan masa jabatan 7 tahun (CNN library, 2019). Sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri yang ditunjuk oleh Presiden. Sebelumnya Yaman terbagi menjadi dua wilayah yaitu Yaman Utara dan Yaman Selatan, yang kemudian pada tanggal 22 Mei 1990 bergabung kembali menjadi Republik Yaman dengan ibukota Sanaa (History, 2010). Setelah penggabungan wilayah ini politik di Yaman juga terbagi menjadi dua, yakni politik otoriter dan juga kesukuan (Pradhan p. K., 2017). Yemen Arab Republic (YAR) atau Yaman Utara dan Republik Demokratik Rakyat Yaman (PDRY) atau Yaman Selatan (Pradhan P. K., 2017). Yaman sendiri memiliki perbatasan wilayah langsung dengan dua negara, yaitu Arab Saudi di sebelah utara dan Oman di sebelah Timur. Karena letaknya yang berada di Jazirah Arab, mayoritas penduduk Yaman beragama Islam, yaitu 99,1% dari penduduk Yaman (CNN library, 2019). Bahasa nasional yang digunakan adalah bahasa Arab.

Sebagai negara islam, Yaman menjalankan nilai-nilai islam dalam pemerintahannya (Yemen Constitution, 2001). Namun hal tersebut tidak membuat Yaman menutup diri untuk membangun hubungan dengan negara-negara lain. Hal tersebut dapat dilihat dengan keikutsertaan Yaman dalam organisasi-organisasi internasional. Diantaranya adalah PBB, OKI, G-77, Gerakan Non-Blok, Organisasi Komunikasi Satelit Arab, Liga Arab dan juga Dana Moneter Arab (CNN library, 2019). Keikutsertaan Yaman dalam organisasi-organisasi internasional tersebut guna membangun hubungan

baik antar anggota dan mempermudah kerjasama diantaranya. Dengan bergabung dengan organisasi-organisasi internasional tersebut, dibangunlah keakraban dan hubungan kerjasama antara Yaman dan negara anggota-anggota organisasi tersebut.

Selain membangun hubungan dengan organisasi-organisasi internasional, Yaman juga selalu berusaha membangun hubungan baik dengan negara-negara lain termasuk tetangganya Arab Saudi. Diketahui sejak tahun 1970-an hingga pertengahan tahun 1980-an Arab Saudi terus memberi bantuan pada Yaman dengan menanggung sebagian besar kebutuhan pembangunan Yaman. Bantuan tersebut dilakukan baik melalui pemberian barang maupun bantuan secara tunai (Anthony J. D., 2000). Segala bantuan yang diberikan Arab Saudi tersebut digunakan untuk pembangunan Yaman berupa klinik medis, rumah sakit, masjid, dan sekolah (Carapico, 2006). Selain itu Arab Saudi juga membantu Yaman agar memiliki armada pesawat sipil yang independen dengan pengambilan saham ekuitas utama di maskapai penerbangan nasional Yaman, Yemenia oleh maskapai penerbangan nasional Arab Saudi, Saudia (Anthony J. D., 2000).

Hubungan antara Yaman dengan Arab Saudi sebelumnya tidak dapat dikatakan selalu baik-baik saja. Sebelumnya terdapat perselisihan diantara kedua negara tersebut mengenai demarkasi perbatasan antar ibu kota Arab Saudi dengan Yaman, Riyadh dan Sanaa. Demarkasi tersebut dimulai pada tahun 1995 dan menimbulkan konflik perbatasan pada tahun 1997 konflik antar kedua negara tersebut terjadi secara sporadis (Anthony J. D., 2000). Setelah terjadi konflik kedua negara tersebut tetap berusaha memperbaiki hubungan yang dimilikinya. Terdapat berbagai kerjasama-kerjasama baik secara langsung maupun tidak langsung, ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Salah satu bentuk kerjasama yang dibangun kedua negara ini adalah harus adanya pembatasan kuota

pekerja migran dari penduduk Yaman di Arab Saudi. Masalah ketenagakerjaan tersebut terkandung dalam perjanjian Taif (1934), dimana masyarakat Yaman Utara diperbolehkan masuk dan bekerja di Arab Saudi tanpa visa (Britannica, 2011) atau dapat dikatakan sebagai perjanjian bebas visa kerja Yaman Utara-Arab Saudi.

Pada tahun 2010 semenanjung Arab mengalami krisis politik setelah terjadi Arab Spring. Saat dimulainya Arab Spring pada tahun 2010, Yaman juga menjadi salah satu negara yang terkena imbas dari masalah tersebut. Diketahui bahwa pada tahun 2011 masyarakat Yaman menuntut diturunkannya pemimpin Yaman yaitu Ali Abdullah Saleh yang telah memerintah dalam kurun waktu 30 tahun (Al Jazeera, 2012). Setelah diturunkannya Ali Abdul Saleh, kekuasaan dipegang oleh wakilnya Abdrabbuh Mansour Hadi. Setelah menjadi presiden Hadi harus menghadapi berbagai masalah yang terjadi di Yaman seperti gerakan separatis di selatan, serangan dari para jihadis, korupsi, pengangguran, ketahanan pangan dan juga kesetiaan dari personil keamanan yang terus memihak pada kubu Saleh (Saputra, 2018).

Ditengah-tengah permasalahan tersebut, muncullah kelompok Houthi. Kelompok ini menjadi aliansi dari pemimpin Yaman sebelumnya yang dipaksa mengundurkan diri sebelumnya, yaitu Ali Abdul Saleh (Hill, 2017). Pada Juli 2014 Houthi mulai melakukan serangan di wilayah Sanaa dan pada September 2014 kelompok Houthi mampu menguasai ibu kota Yaman Sanaa (Al Jazeera, 2018).

Kelompok Houthi ini merupakan bagian dari sekte Zaidi yang merupakan cabang islam Syiah dalam oposisi terhadap salafisme yang berkembang (Riedel, Who are the Houthis, and why are we at war with them?, 2017). Seorang Imam Zaidi didirikan di Yaman Utara pada tahun 893 dan memerintah di Yaman hingga tahun 1962 (Hathaway, 2003). Ideologi politik Houthi sendiri sangat anti-imperial dan menyimpan rasa permusuhan khusus dengan Israel, Amerika

Serikat dan Juga Arab Saudi. Kelompok Houthi sendiri mulai memberontak dikarenakan keinginannya untuk mengembalikan kekuasaan Zaidi di Yaman. (Taqi, 2015).

Houthi sendiri dalam penaklukan Sanaa mendapatkan bantuan dari kubu Saleh yang telah digulingkan pada tahun 2011 (BBC, 2014). Selanjutnya kelompok Houthi bekerjasama dengan personil militer keamanan yang berpihak pada kubu saleh, kelompok Houthi mampu mengambil alih Pelabuhan Hodeida di wilayah Laut Merah pada Oktober 2014 (Aljazeera, 2019). Pelabuhan Hodeida adalah pelabuhan yang sangat penting di Yaman karena merupakan jalur khusus untuk pengiriman barang impor dan juga bantuan kemanusiaan. Setelah pengambilan alih ibu kota Sanaa dan juga Pelabuhan Hodeida, pemerintah melakukan negosiasi dengan kelompok Houthi kelompok Houthi (Saputra, 2018). Namun negosiasi yang dijalani kedua belah pihak gagal, dan istana kepresidenan diambil alih oleh kelompok Houthi yang membuat presiden Abdrabbuh Mansour Hadi dan jajaran pemerintahannya terpaksa mengundurkan diri pada Januari 2015 (BBC, 2015).

Setelah itu Hadi dan jajaran pemerintahannya berpindah ke wilayah Aden. Pada 25 Maret 2015, Hadi meminta bantuan pada Dewan Keamanan PBB dalam menangani Houthi (BBC, 2015). Pada saat yang bersamaan menteri luar negeri Yaman Riad Yassin meminta bantuan militer pada Arab Saudi (Beck, 2015). Pada 26 Maret stasiun TV Arab Saudi Al-Ekhbariya TV melaporkan bahwa Hadi telah tiba di pangkalan militer Riyadh dan telah bertemu dengan mentri pertahanan Arab Saudi Muhammad bin Salman Al Saud (Beck, 2015). Dalam membantu Yaman, Arab Saudi membangun sebuah aliansi militer bersama negara-negara kawasan (CBC, 2015). Arab Saudi berkontribusi dengan memberikan 100 pesawat perang dengan 150.000 tentara perang dalam operasi militer tersebut (Hanna S. A., 2015). Pesawat-pesawat tersebut berasal dari

Mesir, Maroko, Yordania, Sudam Kuwait, Uni Emirat Arab, Qatar dan juga Bahrain (Reuters, 2015).

Pada Maret 2015 anggota Dewan Kerjasama Teluk, kecuali negara Oman telah mendeklarasikan akan melakukan intervensi untuk melawan Houthi atas permintaan Hadi (Aljazeera, 2015). Anggota koalisi mendeklarasikan wilayah udara Yaman adalah daerah terlarang, Raja Salman juga mendeklarasikan Angkatan Udara Kerajaan Saudi akan memegang kontrol penuh atas wilayah tersebut (AlArabiya, 2015). Sejak saat itu, koalisi teluk yang dibangun Arab Saudi terus melancarkan serangan udara ke yaman. Pada 30 Maret 2015 setidaknya 40 orang meninggal dan 200 luka-luka (Diarden, 2015). Hal tersebut dikarenakan serangan udara yang dilakukan di markas militer Haradh yang berdekatan dengan posko pengungsian Al-Mazraq, istana kepresidenan di Sana'a dan juga Bandara Internasional Aden (Hanna S. A., 2015).

Selanjutnya pada 22 April dilakukan serangan udara di Taiz (Chapell, 2015). Pada 28 April 2015 Bandara Internasional Sana'a dibom oleh tentara F-15 milik Arab Saudi untuk mencegah pesawat Iran yaitu Irian Red Crescent Society (IRCS) mendarat di Yaman (guardian, 2015). 6 Mei 2015 koalisi yang dipimpin Arab Saudi melancarkan 130 serangan udara di Yaman dalam jangka waktu 24 jam (Castillo, 2015). Pada 8 Oktober 2016 serangan udara koalisi Arab Saudi melayangkan serangan di balai Sana'a pada saat pemakaman dan menyebabkan 140 orang meninggal dan 600 lainnya luka-luka (Kentish, 2016). Serangan demi serang dari koalisi Arab Saudi terus terjadi hingga hari ini.

Guna menjamin keamanan negaranya Pemerintah Yaman memberikan undangan intervensi pada Arab Saudi. Namun intervensi tersebut juga mengancam kedaulatan Yaman sendiri. Dalam menjaga kedaulatannya pemerintah perlu menjaga integritas teritorial, integritas ideologi dan juga keselamatan warga negara untuk mempertahankan sistem

negara yang yang dimilikinya. Kedaulatan sendiri pada dasarnya kedaulatan memiliki prinsip non-intervensi dalam masalah domestik (Duignan, 2019). Sebagai negara merdeka, tentu Pemerintah Yaman harus mempertahankan kedaulatannya di tanah Yaman. Pemerintah harus mampu menegakkan kedaulatannya untuk melindungi warganya dan mencegah adanya ancaman terhadap perdamaian dunia.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas, tesis ini memiliki satu pertanyaan penelitian: **“Mengapa Mansour Hadi meminta bantuan intervensi militer dari Arab Saudi dalam menghadapi Houthi?”**

## **C. Kerangka Pemikiran**

Masalah diatas dapat dijawab menggabungkan satu teori dasar dengan satu konsep yaitu teori politik luar negeri dan konsep kepentingan nasional. Teori sendiri adalah sesuatu yang menjelaskan mengapa sesuatu terjadi dengan mendeskripsikan kejadian tersebut, dan juga untuk meramalkan kemungkinan kejadian tersebut terulang kembali (Allinson, 1971). Tindakan yang diambil oleh pemerintah diartikan sebagai perilaku individu yang bernalar dan terkoordinasi. Dimana seorang individu tersebut akan menentukan pilihan atas alternatif-alternatif yang ada. Analisa politik luar negeri sendiri harus berdasarkan pada penelaahan akan kepentingan nasional dan tujuan negara, alternatif atau opsi lain dalam penentuan kebijakan dan perhitungan untung-rugi dari segala alternative yang diambil tersebut. Sedangkan konsep adalah sebuah gagasan abstrak yang digunakan untuk menyederhanakan suatu kejadian kompleks yang empiris, hal tersebut digunakan untuk menjelaskan suatu peristiwa (Masoed, 1994). Untuk menjawab

rumusan masalah diatas akan digunakan satu teori yang akan diterapkan yaitu teori politik luar negeri.

Teori politik luar negeri sendiri menurut Graham T. Allinson yang terdapat dalam bukunya yang berjudul *Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis* adalah suatu keputusan luar negeri di suatu negara yang dijelaskan dengan tiga model proses pembuatannya, diantaranya adalah model aktor rasional, model proses organisasi dan juga model politik birokratik. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori politik internasional model aktor rasional.

Menurut model aktor rasional, politik luar negeri adalah tujuan yang ingin dicapai dari suatu perilaku yang dilakukan oleh aktor pemerintahan yang memiliki pengaruh yang kuat dinegaranya. Hal tersebut diumpakan dengan tindakan yang masuk akal dan terarahkan. Selain itu, keputusan luar negeri yang diambil juga berdasarkan kepentingan dan tujuan nasional negara tersebut. Para aktor rasional yang berada dalam pemerintahan ini harus memiliki arah dan tujuan politik yang beragam dengan tetap mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari haluan yang diambil oleh dengan menetapkan tujuan dan peringkat dari opsi yang akan diambil oleh aktor tersebut (Allinson, 1971). Selain itu dalam bukunya, Graham T. Alisson menyatakan bahwa:

*“The assumption of rational behavior not just of intelligent behavior, but of behavior motivated by conscious calculation of advantages, calculation that in turn is based on an explicit and internally consistent value system.”*

Artinya dalam pengambilan keputusan pemerintah akan selalu bertindak sesuai dengan nalar terkoordinasi. Pemerintah akan mencari segala kemungkinan atau alternatif lain dan melakukan kalkulasi untung rugi sebelum menentukan kebijakan luar negerinya. Berdasarkan pemaparan diatas, dapat dikatakan bahwa pemerintah akan meminimalisir keurgian dan memaksimalkan keuntungan sebelum mengeluarkan kebijakannya. Tindakan tersebut juga tetpa dipengaruhi oleh kepentingan negaranya. Dalam proses pengambilan keputusan sendiri, Model Aktor Rasional memiliki beberapa tahapan yaitu menentukan tujuan, pilihan lain atau alternatif lain, konsekuensi dan juga pilihan keputusan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan politik luar negeri model aktor rasional. Karena jika melihat asumsi dasar dari model aktor rasional milik Allinson, aktor yang disini merupakan pemerintah yaman akan berupaya untuk memaksimalkan kepentingan nasionalnya dengan dasar kalkulasi rasional dalam kancah politik global. Hasil pertimbangan tersebut juga diambil dari seluruh alternatif yang ada dan akan dipilih secara rasional dengan memadukan faktor politik domestik dan internasional guna mendapatkan keuntungan dari tindakan yang akan diambil tersebut. Berdasarkan tahapan pengambilan keputusannya, Model Aktor Rasional dinilai merupakan hasil keputusan yang matang, tepat dan prudent karena telah melewati tahapan yang berdasar pertimbangan yang rasional intelektual dan juga kalkulasi untung-rugi.

Selain itu, dalam pengambilan keputusan, negara harus selalu mementingkan kepentingan nasionalnya. Karenanya kerjasama Yaman dengan Arab Saudi juga merupakan hasil dari pengambilan



keputusan yang berdasar pada kepentingan nasional. Hal tersebut dapat dilihat dari pemerintah Yaman yang memiliki kepentingan nasional untuk memegang kontrol pada kelompok Houthi dan mengambil alih pusat pemerintahan yang direbut oleh kelompok Houthi. Dalam kasus kerjasama militer Pemerintah Yaman dengan Arab Saudi ini, jika konsep kepentingan nasional dipadukan dengan model aktor rasional akan sangat membantu dalam menganalisis alasan kerjasama pemerintah Yaman dengan Arab Saudi dalam memerangi kelompok Houthi.

Dari beberapa alternatif tersebut, penulis menganalisis kalkulasi untung-rugi dari setiap alternatif yang ada, penulis menjabarkannya dengan tabel berikut:

**Table 1.1 Analisa Kalkulasi Untung Rugi Permintaan Bantuan Intervensi Militer Arab Saudi di Yaman**

Indikator	Untung	Rugi
Mendapat bantuan intervensi militer dari Arab Saudi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah Yaman dapat merebut kembali kekuasaannya yang diambil oleh kelompok Houthi.</li> <li>2. Persenjataan dan militer yang dimiliki Arab Saudi lebih canggih dan kuat dari pada Yaman untuk menanggulangi Houthi.</li> <li>3. Yaman dapat menerima akses senjata dalam menangani Houthi</li> <li>4. Setelah perang selesai pusat pemerintahan dapat kembali pada Pemerintah yang sah</li> <li>5. Mencegah dan meminimalisir persebaran paham Syiah di Yaman.</li> <li>6. Selama perang terjadi pemerintah Yaman tidak perlu mengeluarkan anggaran militer untuk melawan Houthi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah Yaman harus kehilangan kepercayaan dari warganya yang tergabung dalam kelompok Houthi.</li> <li>2. Kemungkinan tidak adanya peningkatan hubungan antara pemerintah dengan anggota kelompok Houthi kedepannya.</li> <li>3. Kerusakan Infrastruktur negara selama perang.</li> </ol>
Tidak mendapat bantuan intervensi militer dari Arab Saudi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perang sipil tidak akan terjadi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pusat pemerintahan akan terus dikuasai oleh kelompok Houthi.</li> <li>2. Paham Syiah yang akan terus menyebar di wilayah Yaman.</li> <li>3. Pemerintah Yaman perlu mengeluarkan anggaran militer dalam memerangi kelompok Houthi.</li> </ol>

Dari kedua alternatif diatas, dapat dilihat jika alternatif pertama dimana pemerintah Yaman harus bekerjasama dengan Arab Saudi dalam memerangi Houthi adalah alternatif yang memiliki keuntungan paling banyak. Keuntungan yang diterima dari alternatif pertama sebanyak 7 (tujuh) dengan 3 (tiga) kerugian dibandingkan dengan alternatif lainnya.

Sebagai negara merdeka, Pemerintah Yaman merasa harus mempertahankan kedaulatannya di tanah Yaman. Dengan kedaulatan yang dimilikinya Pemerintah Yaman memiliki hak dan kemampuan untuk membuat dan menegakkan aturan di negaranya. Hal tersebut dikarenakan sudah merupakan bagian dari tanggung jawab Pemerintah untuk menjaga kedaulatannya. Pemerintah harus mampu menegakkan kedaulatannya untuk melindungi warganya dan mencegah adanya ancaman terhadap perdamaian dunia. Meski memiliki pada dasarnya kedaulatan memiliki prinsip non-intervensi dalam masalah domestik, namun intervensi juga memungkinkan dilakukan terhadap negara yang tidak mampu menjalankan tanggung jawabnya atas kedaulatan yang dimilikinya (Duignan, 2019). Maka dari itu, sebagai Aktor Rasional pemerintah Yaman tentu saja akan mencapai kepentingan nasionalnya untuk mempertahankan kedaulatannya dengan mengambil alternatif yang memiliki kalkulasi keuntungan terbesar dan kerugian paling kecil. Karena lebih baik memperbaiki dari pada merusak kedaulatan yang dimiliki.

#### **D. Hipotesis**

Berdasarkan latar belakang dan kerangka pemikiran yang telah dijabarkan, maka dapat ditarik hipotesis penelitian bahwa **Pemerintah Yaman meminta bantuan intervensi militer pada Arab Saudi untuk menangani kelompok Houthi** dikarenakan pemerintah Yaman ingin mencapai kepentingan nasionalnya dengan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian jika

meminta bantuan militer pada Arab Saudi. Pemerintah beranggapan bahwa:

1. Intervensi Arab Saudi efektif untuk menyelesaikan masalah Houthi.
2. Persepsi positif dari Pemerintah Yaman terhadap intervensi Arab Saudi di Yaman.

### **E. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab mengapa pemerintah Yaman memilih untuk bekerjasama dengan Arab Saudi untuk memerangi Houthi dalam krisis politik yang terjadi di Yaman.

### **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang digunakan untuk menjelaskan rumusan masalah dan untuk memverifikasi hipotesis berdasarkan data empiris. Metode penelitian kualitatif sendiri adalah sebuah metode pendekatan yang bersifat eksplorasi yang digunakan oleh seorang individu atau kelompok untuk memahami alasan, opini dan motivasi yang mendasari suatu perilaku. Metode penelitian kualitatif sendiri tidak memiliki hubungan atau kontak dengan subyek yang diteliti karena peneliti akan mengumpulkan data secara induktif atau melakukan penelitian mulai dari tema khusus hingga tema umum untuk menginterpretasikan makna dari data yang diperoleh. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang melakukan pengumpulan berbagai macam material empiris seperti sejarah, studi kasus, observasi, wawancara, pengalaman personal, *focus group discussion*, cerita kehidupan, interaksional, biografi, *content analisis*, dan berbagai teks visual yang menggambarkan kejadian-kejadian rutin dan problematis. Peneliti sendiri dituntut untuk memiliki wawasan dan kepekaan yang tinggi agar makna yang terkandung dapat diinterpretasikan dengan baik (Bakry, 2016).

Dalam metode kualitatif terdapat berbagai metode pengumpulan data, seperti metode berbasis wawancara, pengamatan, observasi partisipatif, dokumen, internet, kelompok fokus (*Focus Groups*), survei. Dalam metode berbasis dokumen sendiri dibagi kembali menjadi dokumen primer dan dokumen sekunder. Dokumen primer atau lebih sering dikenal sebagai dokumen resmi adalah sebuah dokumen yang dikeluarkan oleh negara, organisasi, atau kelompok bisnis. Namun, dokumen ini memiliki akses yang terbatas karenanya sulit untuk didapatkan. Sedangkan, dokumen sekunder adalah sebuah dokumen yang mengacu pada dokumen primer. Biasanya dokumen sekunder ini dikeluarkan oleh orang yang tidak hadir langsung dalam di tempat kejadian, tetapi mereka akan mendapatkan data dari proses wawancara dengan saksi mata atau dengan membaca dokumen primer (Bakry, 2016).

Guna merespon penelitian yang berjudul *Kerjasama Pemerintah Yaman Dengan Arab Saudi Dalam Krisis Politik di Yaman dan memverifikasi hipotesis yang berdasarkan data empiris*, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif studi pustaka. Dalam pengolahan data, penulis melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data yang berdasarkan data sekunder seperti buku, jurnal, website lembaga-lembaga terkait, laporan-laporan mengenai kasus yang diteliti, serta penelitian-penelitian sebelumnya yang masih memiliki hubungan dengan kasus yang diteliti penulis.

### **G. Jangkauan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis akan membatasi jangkauan penelitian. Penelitian ini berfokus pada alasan pemerintah Yaman yang menjadikan Arab Saudi sebagai sekutunya dalam memerangi Houthi guna mengambil kembali kekuasaannya di Yaman. penelitian ini akan

menggunakan data dari tahun 2015 dimana kelompok Houthi mampu menguasai ibu kota Sana'a dan juga dapat menguasai pusat pemerintahan Yaman dan membuat Pemerintah Yaman meminta bantuan pada Arab Saudi. Jangkauan penelitian skripsi ini hingga tahun 2019. Fungsi dari pembatasan ini guna mempermudah penulis dalam mencari data mengenai alasan pemerintah Yaman bekerjasama dengan Arab Saudi dan juga membedakan dengan penelitian yang lain.

## **H. Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyediakan 5 bab besar yang berguna untuk menjelaskan skripsi ini. Dalam bab besar tersebut terdapat sub-sub bab untuk memperinci penjelasan dari bab besar sebelumnya. Hubungan antar bab didalam skripsi ini ditulis secara sistematis untuk memudahkan pembaca untuk memahami isi dari skripsi, yang akan dibagi sebagai berikut:

Bab I membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesis, tujuan penelitian, metode penelitian, jangkauan penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II membahas mengenai dinamika politik Yaman. Dimana akan dijelaskan mengenai profil negara Yaman, keikutsertaan Yaman dalam organisasi internasional dan juga hubungan bilateral Yaman dengan Arab Saudi sebelum tahun 2015 saat Pemerintah Yaman meminta bantuan intervensi pada Arab Saudi.

Bab III membahas bagaimana Pemerintah Yaman meminta bantuan intervensi militer pada Arab Saudi. Hal tersebut akan dijelaskan dengan mendeskripsikan kelompok Houthi dan bagaimana kelompok tersebut lahir dan melakukan pemberontakan kepada pemerintahan Hadi. Lalu penulis juga akan menjelaskan kronologi permintaan bantuan intervensi militer yang dilakukan oleh

Pemerintah Yaman terhadap Arab Saudi. Setelah itu akan dibahas mengenai apa saja bantuan intervensi militer yang dilakukan Arab Saudi dalam merespon permintaan bantuan Yaman tersebut. Terakhir akan dijabarkan bagaimana respon-respon organisasi internasional mengenai krisis di Yaman.

Bab IV menjelaskan hipotesa berupa alasan pemerintah Yaman meminta bantuan militer pada Arab Saudi karena kepentingan nasionalnya yaitu untuk menjaga kedaulatan yang dimilikinya. Penulis akan menjelaskan mengenai bagaimana kedaulatan Yaman yang terancam karena kehadiran Kelompok Houthi di Yaman. Selain itu, penulis akan menjelaskan mengapa kehadiran Arab Saudi dalam krisis politik di Yaman dinilai sebagai keuntungan bagi Pemerintah Yaman.

Bab V berisi mengenai kesimpulan skripsi yang telah dijelaskan sebelumnya dalam bab I hingga bab IV, sekaligus menjadi bagian akhir dari skripsi ini.